

Forum Pemred Serukan Netralitas Jelang Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan, serta berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu.

"Khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia," tulis Forum Pemred, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/11).

Seruan serupa juga disampaikan Forum Pemred kepada para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), pimpinan partai politik, dan tim pemenangan untuk menaati dan tidak melakukan tindakan kecurangan dalam pemilu, apalagi memanfaatkan kekuasaan.

Para kontestan pemilu juga diminta untuk menjalankan kampanye secara damai, mengedepankan adu gagasan dan program, tidak meresahkan, menghasut dan mengadu domba masyarakat, serta tidak menyebarkan hoaks dan menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat memecah belah.

Forum Pemred juga menyerukan agar capres dan cawapres maupun tim kampanye yang masih menjabat sebagai pejabat negara segera mengundurkan diri dari jabatan tersebut untuk menutup celah memanfaatkan fasilitas negara.

"Agar berkomitmen melakukan pertarungan politik dalam Pemilu 2024 melalui cara yang fair dan etis, tidak mencederai semangat demokrasi, dan tidak membangun pemerintahan yang otoriter," tulis Forum Pemred.

TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum juga diminta agar berkomitmen menjaga stabilitas pertahanan, keamanan, dan hukum di seluruh Indonesia agar proses pemilu berjalan secara damai, lancar, dan sukses. TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum juga diingatkan untuk tidak partisan dan bersikap adil bagi semua kontestan pemilu.

Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu diminta untuk menjalankan semua tahapan proses pemilu secara profesional, transparan, jujur, dan adil, serta menjaga kredibilitas proses dan hasil pemilu dari berbagai upaya intervensi pihak mana pun. ● han

Harta Anggota BPK Pius Lustrilang, Kantor Disegel Terkait OTT Pj Sorong

JAKARTA (IM) - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pius Lustrilang, Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Belum diketahui kaitan Pius dengan perkara Pj Bupati Sorong. Namun demikian, OTT Pj Bupati Sorong sendiri berkaitan dengan pengkondisian temuan hasil audit BPK RI Provinsi Papua Barat Daya. Pius merupakan Anggota BPK yang salah satu ruang lingkup kerjanya di Papua Barat.

Berdasarkan hasil penelusuran laman elhkn.kpk.go.id, Pius memiliki harta kekayaan Rp9.738.861.141 (Rp9,7 miliar). Hartanya tersebut terakhir kali dilaporkan ke KPK pada 31 Maret 2022 untuk periodik 2021. Selebihnya, belum ditemukan laporan terkini harta kekayaan Pius.

Harta kekayaan Pius meliputi enam aset bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor dan Jakarta Timur senilai Rp5,3 miliar. Keseluruhan tanah dan bangunan Pius yang dilaporkan ke KPK tersebut merupakan hasil sendiri.

Tak hanya itu, Pius tercatat juga memiliki mobil BMW tahun 2021 senilai Rp400 juta; kemudian, Toyota Voxy tahun 2020 senilai Rp350 juta; serta Toyota Fortuner tahun 2018 senilai Rp235 juta. Total nilai tiga aset mobil Pius tersebut sejumlah Rp985 juta.

Pius tercatat juga memiliki harta bergerak lainnya Rp95 juta. Kemudian, ia juga mempunyai surat berharga Rp540 juta. Terakhir, ia mempunyai kas dan setara kas Rp2,7 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan Pius Rp9.738.861.141 (Rp9,7 miliar). ● han

Pj Bupati Sorong Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan di Rutan KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga mengkondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Papua Barat Daya.

Setelah diumumkan, lembaga antirasuah langsung melakukan penahanan terhadap Yan Piet.

Selain Yan Piet, KPK juga menetapkan dan menahani lima tersangka lain, yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Efer Sidegat; staf BPKAD Kabupaten Sorong, Maniel Syatfle (MS); Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing (PLS); Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa (AH); dan Ketua Tim Pemeriksa, David Pataung (DP).

"Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik melakukan penahanan para Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Ketua KPK, Firlil Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11).

Sekadar informasi, KPK menggelar OTT pada Minggu (12/11). Dalam operasi senyap tersebut KPK menangkap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Ketua KPK Firlil Bahuri membeberkan kronologis OTT yang digelar di dua daerah pada Minggu, 12 November 2023. Dua daerah

tersebut yakni Kabupaten Sorong dan Kota Jakarta. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi senyap di dua daerah tersebut.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 10 orang pada Minggu, 12 November 2023 yang berada di dua wilayah berbeda yaitu di Kabupaten Sorong dan Jakarta," kata Firlil saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Adapun, 10 orang tersebut yakni, Efer Segidifit (ES) selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sorong; Maniel Syatfle (MS) selaku Staf BPKAD Kabupaten Sorong; Yan Piet Mosso selaku Pj Bupati Kabupaten Sorong; Abu Hanifa (AH) selaku Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat; David Pataung (DP) selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK.

Kemudian, Anggota Tim Pemeriksa berinisial DFD; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing (PLS); Staf BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berinisial DM; Security BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berinisial EP; dan Tenaga Ahli BPK berinisial FJ.

Awalnya, kata Firlil, KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian temuan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong Provinsi

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



GELAR PASUKAN LATIHAN GLAGASPUR L-III SATKOR DAN SATFIB

Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyon (kelima kiri) melakukan inspeksi prajurit TNI Angkatan Laut saat apel gelar pasukan latihan Gladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3) Satuan Kapal Eskorta dan Satuan Kapal Amfibi di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya, Jatim, Selasa (14/11).

PDIP Resmi Pecat Wali Kota Medan, Menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, dipecat PDIP. Wali Kota Medan itu terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai kategori berat.

JAKARTA (IM) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP-Perjuangan resmi mencopot menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dari keanggotaan PDIP-P. Langkah itu diambil lantaran dukungan Bobby terhadap paslon capres-cawapres berbeda dengan putusan partai dan tak kunjung kembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Surat tersebut memuat sembilan poin yang mencantumkan terkait aturan pilpres. Surat tersebut juga turut menyanggah Surat DPP PDIP Perjuangan Nomor: 5675/IN/DPP/XI/2023, tertanggal 4 November 2023, perihal undangan mengklarifikasi Bobby terkait arah dukungan capres-cawapres.

Adapun hasil klarifikasi itu, Bobby diberikan waktu tiga hari oleh DPP PDIP-Perjuangan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai serta mengembalikan KTA PDIP Perjuangan kepada DPC

PDIP Perjuangan Kota Medan.

"Sampai batas waktu yang diberikan oleh DPP Partai bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution belum juga menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA PDIP Perjuangan kepada DPC PDIP Perjuangan Kota Medan," demikian tulis surat tersebut.

Atas pertimbangan itu, DPC PDIP Perjuangan Kota Medan mencopot Bobby dari keanggotaan partai. Pasalnya, Wali Kota Medan itu telah ter-

bukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai kategori berat.

"Sehingga Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP Perjuangan," tegas bunyi surat tersebut.

Keputusan pencopotan itu, tertuang dalam surat DPC PDIP Kota Medan Nomor : 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 tertanggal 10 November 2023. Surat itu pun telah dilayangkan kepada Bobby pada Senin (11/11/2023).

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim, dan Sekretaris DPC PDIP Perjuangan Kota Medan

Roby Barus.

Diketahui, Bobby telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran. Bahkan, Bobby hadir deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang di Jakarta Theatre, Rabu (8/11). Bobby merupakan ketua umum relawan tersebut.

Wali Kota Medan yang juga kader PDIP-Perjuangan (PDIP) Bobby Nasution telah memenuhi undangan panggilan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Sejatinya, Bobby diklarifikasi terkait dukungannya di Pilpres 2024 ke kakak iparnya, Gibran Rakabuming Raka yang juga bacawapres dari Prabowo Subianto. Hal itu

disampaikan Ketua Bidang Kchormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

"Makanya kita minta Bobby klarifikasi ya, karena di PDIP nggak bisa orang main dua kaki gitu. Tetapi tadi Mas Bobby itu apa ya antara perasaan ya yang sekarang lagi bergejolak antara perasaan dan pikiran dia harus mau ke mana," kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Kepada Komarudin, Bobby ingin meminta izin bergabung mendukung Gibran, tetapi tetap berada di PDIP. Hanya saja, permintaan itu tak diamini oleh Komarudin. ● han

Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023



Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya dapat menunjukkan performa keuangan suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja adalah mendapatkan opini terbaik dalam penyajian laporan keuangan yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Oleh karena itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, sedangkan BPKAD bertugas mengkoordinasikannya. Demikian pula untuk laporan keuangan, BPKAD bertugas untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan laporan keuangan seluruh perangkat daerah menjadi satu laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan pada Hari Selasa dan Rabu, Tanggal 26 dan 27 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Madya Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh Peserta sebanyak 125 orang, (57 Perempuan dan 68 Laki-laki) yang merupakan utusan dari 72 Perangkat Daerah se Kabupaten Bogor dari Sub Bagian. Keuangan SKPD, Petugas Akuntansi serta Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyeragamkan serta menambah pemahaman peserta dalam proses Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Resume paparan Nara sumber :

1. Strategi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disampaikan oleh Dindin Mahpudin, SE.,Ak.,M. Ak.,CA.,AAP,ACPA (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat) :

1. Meningkatkan awareness Pejabat di Lingkungan Pemda terkait pentingnya laporan keuangan;

2. Mengidentifikasi berbagai kelemahan yang terdapat pada laporan keuangan sehingga dapat teridentifikasi peluang apa saja yang memungkinkan dalam melakukan perbaikan;

3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

4. Target pencapaian opini WTP pada penyusunan LKPD merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu komitmen dari OPD untuk mempertahankan Opini WTP terutama bagi pelaksana langsung dimulai dari Pengguna Anggaran;

5. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melakukan sistem pengenda-

lian intern keuangan dan barang milik daerah secara optimal.

II. Peran Entitas Akuntansi (Perangkat Daerah) dalam Penyusunan LKPD

Rini Prihanti, SE.,Ak (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKAD Provinsi Jawa Barat)

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4. Menjelaskan posisi SKPD selaku entitas akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi oleh PPKD selaku entitas pelaporan;

5. Mengilustrasikan proses penyusunan laporan keuangan sebelum pelaksanaan review oleh APIP;

6. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

7. Menjelaskan hubungan antara standar, kebijakan dan sistem sebagai sebuah proses yang saling mengerjakan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

8. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Sasaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor ini adalah untuk mengembangkan kemampuan para peserta kegiatan agar proses akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian. ● Adv

